

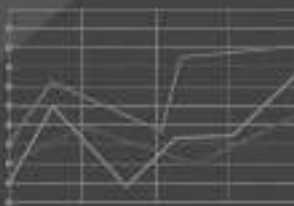
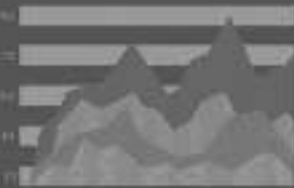
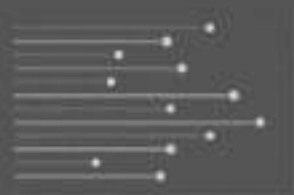
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN MAGELANG MENURUT PENGELUARAN **2013-2017**



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAGELANG**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN MAGELANG
MENURUT PENGELUARAN**

2013-2017



Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magelang Menurut Pengeluaran 2013-2017

ISSN: 2620-469X

No Publikasi : 33080.1804

Katalog: 9302020.3308

Ukuran Buku : 21cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : xvi + 66 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Gambar Kover oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Ilustrasi Kover:

Candi Selogriyo di Kecamatan Windusari

Diterbitkan oleh :

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Dicetak Oleh:

TM Percetakan (Cetakan I: Agustus 2018)

Percetakan Daerah Aneka Usaha (Cetakan II: Oktober 2018)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum:

Ir. Sri Wiyadi, M.M

Penyunting:

Dewi Prastiwi, S.Si

Lestari Indriani, S.Si, M.Ec.Dev.

Penulis:

Restu Asih Trianto, SST, MM

Pengolah Data:

Restu Asih Trianto, SST, MM

Gambar Kulit:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

SAMBUTAN

KEPALA DISKOMINFO KABUPATEN MAGELANG

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, kami menyambut gembira atas diterbitkannya publikasi “Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magelang Menurut Pengeluaran 2013-2017”.

Buku ini sangat bermanfaat, salah satunya untuk menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kinerja pembangunan ekonomi di Kabupaten Magelang. Melalui publikasi ini dapat dipahami tentang pengembangan model ekonomi dalam rangka menyusun kebijakan yang akan digunakan dalam pembangunan daerah.

Data yang termuat dalam buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi stakeholders yang terlibat dalam pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, penentuan kebijakan publik, penelitian dan pengembangan. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, juga dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lainnya.

Akhirnya kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang berperan terhadap penerbitan publikasi ini. Semoga publikasi ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi yang bermanfaat bagi semua pihak.

Kota Mungkid, Oktober 2018
Plt. Kepala Diskominfo
Kabupaten Magelang
Kepala Bappeda dan Litbangda



Drs. Sugiyono, M.Si.

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu: (i) pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), (ii) pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*expenditure*), dan (iii) pendekatan pendapatan (PDRB menurut Pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), dan Ekspor Neto Antardaerah (ekspor antardaerah dikurangi dengan impor antardaerah). Data PDRB dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts* 2008 seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Kota Mungkid, Agustus 2018
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Kabupaten Magelang,



Ir. Sri Wiyadi, MM

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Grafik	xiii
Daftar Lampiran	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 5
A. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	7
B. Kegunaan Statistik PDRB	8
 BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	 11
A. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT)	13
B. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT (PKLNPRT)	16
C. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PKP)	18
D. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	20
E. Perubahan Inventori	24
F. Ekspor Impor Barang Dan Jasa	27
 BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN MAGELANG BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN KABUPATEN MAGELANG, 2013-2017	 29
A. Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Magelang Menurut Pengeluaran	31
B. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	36
C. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	37
D. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	38
E. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	40
F. Perkembangan Perubahan Inventori	40
G. Perkembangan Net Ekspor Antardaerah	42
 BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN MAGELANG MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2013-2017	 45
A. PDRB (Nominal)	47

B. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB	48
C. Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	48
D. Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	49
E. <i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>	50
BAB V PENUTUP	53
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. PDRB Adh Berlaku menurut Pengeluaran, 2013-2017 (Triliun Rupiah)	31
Tabel 3.2. PDRB Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2013-2017 (Triliun Rupiah)	32
Tabel 3.3. Distribusi PDRB Kabupaten Magelang Adh Berlaku menurut Pengeluaran, 2013-2017 (Persen)	33
Tabel 3.4. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Magelang Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2013-2017 (Persen)	35
Tabel 3.5. Perubahan Indeks Implisit PDRB Kabupaten Magelang menurut Pengeluaran, 2013 - 2017 (Persen)	35
Tabel 3.6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Magelang, 2013-2017	36
Tabel 3.7. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Magelang, 2013 – 2017	38
Tabel 3.8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Magelang, 2013 – 2017	39
Tabel 3.9. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Magelang, 2013-2017	40
Tabel 3.10. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Magelang, 2013-2017	41
Tabel 3.11. Net Ekspor Adh Berlaku dan Adh Konstan 2010, 2013-2017	41
Tabel 4.1. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita Kabupaten Magelang, 2013-2017	47
Tabel 4.2. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Kabupaten Magelang, 2013-2017	48
Tabel 4.3. Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Magelang, 2013-2017	49
Tabel 4.4. <i>Incremental Capital Output Ratio</i> Kabupaten Magelang, 2013-2017	50

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.	Perbandingan PDRB Kabupaten Magelang Adh Berlaku dan Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2013-2017 (Triliun Rupiah)	3
Grafik 3.2.	Perbandingan Distribusi PDRB Kabupaten Magelang menurut Pengeluaran, 2013 dan 2017 (Persen)	34
Grafik 3.3.	Pertumbuhan Beberapa Komponen Pengeluaran PDRB Kabupaten Magelang, 2013-2017 (Persen)	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	
Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2013-2017	59
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010	
Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2013-2017	60
Lampiran 3. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran	
Kabupaten Magelang, 2013-2017	61
Lampiran 4. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010	
Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2013-2017	62
Lampiran 5. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	
Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2013-2017	63
Lampiran 6. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010	
Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2013-2017	64
Lampiran 7. Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang,	
2013-2017	65
Lampiran 8. Perubahan Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten	
Magelang, 2013-2017	66



PDRB

KAB. MAGELANG 2017

MENURUT PENGELUARAN



PERKEMBANGAN ICOR 2013-2017



Ringkasan Eksekutif

Kondisi perekonomian Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun menunjukkan performa yang kian membaik. Hal ini terlihat dari total nilai PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang tetap menunjukkan arah positif. Perkembangan ekonomi Kabupaten Magelang dapat digambarkan melalui Nilai PDRB atas dasar harga (adh) Berlaku dan atas dasar harga (adh) Konstan, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Nilai PDRB Kabupaten Magelang adh Berlaku selama 2013—2017 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 nilai PDRB Kabupaten Magelang adh Berlaku sebesar 19,60 triliun rupiah, meningkat menjadi 28,05 triliun rupiah di tahun 2017, atau terjadi peningkatan sekitar 43 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Selain dinilai adh Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh Konstan didapatkan bahwa nilai PDRB Kabupaten Magelang adalah sebesar 20,88 triliun rupiah pada 2017, meningkat 22,68 persen dibanding tahun 2013, yang hanya mencapai 17,02 triliun rupiah.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPRT (PKLNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor. Selama periode 2013-2017, produk yang dikonsumsi di Kabupaten Magelang sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 72 persen), sedangkan konsumsi akhir pemerintah hanya memberi kontribusi sekitar 8 - 9 persen saja. Ekspor dan Impor juga mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 33 - 36 persen produk Kabupaten Magelang diperdagangkan ke luar daerah dan sekitar 44 - 56 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk impor dari luar daerah. Hal yang perlu diperhatikan adalah selama 2013-2017 perdagangan Kabupaten Magelang yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan posisi defisit. Ini berarti, nilai ekspor di Kabupaten Magelang selalu lebih rendah dari nilai impor.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang dari tahun 2013 - 2017 terlihat fluktuatif namun cenderung melambat, meski masih di atas lima persen, yaitu sebesar 5,91 persen (2013); 5,38 persen (2014); 5,18 persen (2015), 5,37 persen (2016), dan 5,06 persen (2017). Sementara itu, indeks implisit PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan nilai positif. Pada 2017, indeks implisit PDRB Kabupaten Magelang mencapai 2,24 persen, sedangkan pada 2013 mencapai 4,34 persen.

Di sisi lain, nilai *ICOR* yang sering diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran), besarnya terlihat fluktuatif namun cenderung meningkat, yaitu dari 4,74 pada 2013 menjadi 5,45 pada 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa investasi belanja modal di Kabupaten Magelang semakin tidak efektif, karena butuh lebih besar kapital untuk mendapatkan 1 unit nilai output.

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah/*region* tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 yang diharapkan dapat mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

1. Pendekatan Produksi,

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

3. Pendekatan Pengeluaran,

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tidak langsung neto.

B. KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah/*region*. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, atau setiap sektor, dari tahun ke tahun.

3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah/daerah/*region*. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah/daerah/*region*.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran dapat menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri/luar wilayah.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan institusi dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
7. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

A. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PKRT)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh institusi lain.

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama.

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 (dua belas) COICOP tersebut dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok

2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
 Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).
- Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas, menghasilkan besarnya PKRT adh Berlaku. PKRT adh Konstan 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT adh Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok COICOP,
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;;

6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

B. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT (PKLNPRT)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tidak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud di sini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 (tujuh) jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Nilai Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PKLNPRT) sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan; pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dan lain-lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKLNPRT adalah :

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SKLNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

PKLNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP). Tahapan estimasi PKLNPRT adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PKLNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

b. Mengestimasi PKLNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} x_{ij} \times N_i$$

X : PKLNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PKLNPRT adh Berlaku. PKLNPRT adh Konstan 2010, diperoleh dengan cara men-deflate PKLNPRT adh Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

C. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PKP)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari

Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidentil dari fungsi pokok unit pemerintah.
- b. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

2. Metode Penghitungan

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Tahunan adalah:

- Data realisasi APBN Tahunan (KPPN)
- Data realisasi APBD Tahunan (DPPKAD)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

a. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

PK-P adh Berlaku= Output non pasar—penjualan barang dan jasa + Output Bank Indonesia
--

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

D. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi di sini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

PMTB terdiri dari:

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi; reklamasi pantai; pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan; serta pencegahan banjir dan erosi).

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PMTB adalah :

- Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS.
- Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- Laporan keuangan perusahaan.
- IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
- Publikasi Statistik Konstruksi.

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “*deflate*” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “*reflate*”(dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal

yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-*deflate* PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstannya diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data yang dikumpulkan antara lain nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstannya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang

diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

E. PERUBAHAN INVENTORI

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Tetap Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei;
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD;
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, dan ternak dari Dinas Pertanian.

Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung

adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh Berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan meng-*inflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan, bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. men-*deflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;

- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

F. EKSPOR IMPOR BARANG DAN JASA

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari daerah
- Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari daerah
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- Net Ekspor antardaerah
 - Ekspor antardaerah
 - Impor antardaerah

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi ekspor impor adalah :

- Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- Neraca Pembayaran Indonesia dari Bank Indonesia
- Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu, nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented trasnsaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

BAB III
TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN MAGELANG
BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN
KABUPATEN MAGELANG, 2013-2017

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Magelang akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2013 sampai dengan 2017, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di Kabupaten Magelang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

A. TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN MAGELANG MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Kabupaten Magelang menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang tetap menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB atas dasar harga (adh) Berlaku dan atas dasar harga (adh) Konstan, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Tabel 3.1. PDRB Adh Berlaku menurut Pengeluaran, 2013-2017 (Triliun Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	15,20	16,53	17,82	19,07	20,41
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,36	0,42	0,45	0,49	0,52
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,73	1,92	2,13	2,21	2,35
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,15	5,91	6,57	7,05	7,70
5. Perubahan Inventori	0,99	1,15	0,80	0,21	0,38
6. Ekspor	7,05	7,48	8,09	9,20	9,31
7. Impor	10,88	11,48	11,71	12,11	12,62
PDRB	19,60	21,92	24,15	26,11	28,05

Sumber: BPS Kabupaten Magelang

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB Kabupaten Magelang adh Berlaku selama periode 2013 sampai dengan 2017 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 nilai PDRB Kabupaten Magelang adh Berlaku sebesar 19,60 triliun rupiah meningkat menjadi 28,05 triliun rupiah di tahun 2017. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terjadi peningkatan sekitar 43 persen, yang dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume pada waktu tersebut.

Tabel 3.2. PDRB Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2013-2017 (Triliun Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	12,72	13,17	13,71	14,32	14,97
2. Pengeluaran Konsumsi LN PRT	0,30	0,32	0,32	0,34	0,35
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,39	1,43	1,46	1,47	1,51
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,50	4,68	4,89	5,12	5,48
5. Perubahan Inventori	0,54	0,56	0,16	0,14	0,15
6. Ekspor	7,30	7,28	7,84	8,29	8,64
7. Impor	9,74	9,50	9,52	9,81	10,22
PDRB	17,02	17,94	18,86	19,88	20,88

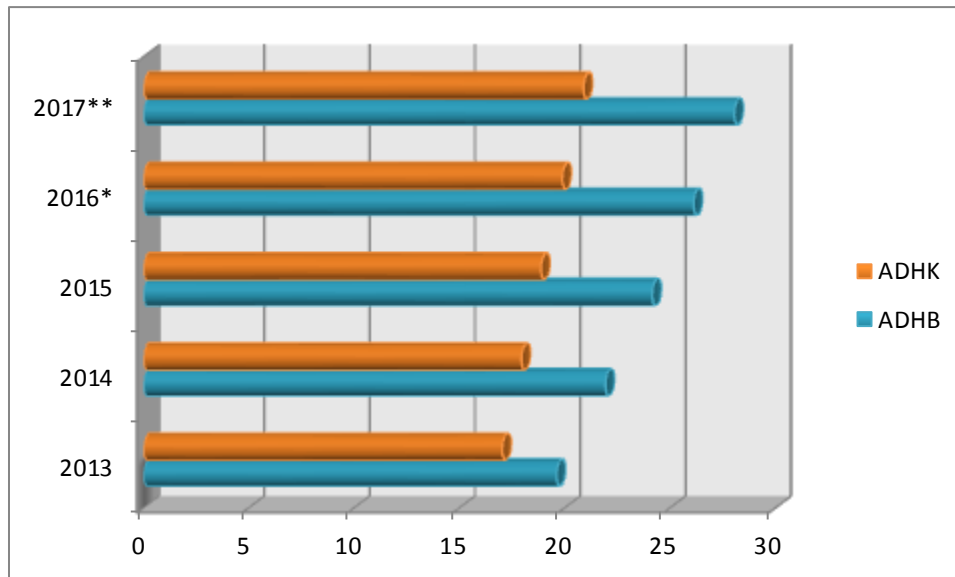
Sumber: BPS Kabupaten Magelang

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Selain dinilai adh Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh Konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2013-2017, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Magelang berdasarkan PDRB adh Konstan 2010 dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas.

Dari gambar 3.1 dan 3.2, nampak bahwa nilai PDRB adh Berlaku lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh harga telah ditiadakan.



Sumber : BPS Kabupaten Magelang

Grafik 3.1. Perbandingan PDRB Kabupaten Magelang Adh Berlaku dan Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2013-2017 (Triliun Rupiah)

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPRT (PKLNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Tabel 3.3. Distribusi PDRB Kabupaten Magelang Adh Berlaku menurut Pengeluaran, 2013-2017 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	77,56	75,38	73,81	73,03	72,77
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,84	1,90	1,86	1,86	1,85
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,83	8,74	8,81	8,46	8,36
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,26	26,96	27,20	27,00	27,45
5. Perubahan Inventori	5,03	5,26	3,31	0,79	1,36
6. Ekspor	35,99	34,13	33,52	35,24	33,19
7. Impor	55,50	52,37	48,51	46,38	44,98
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

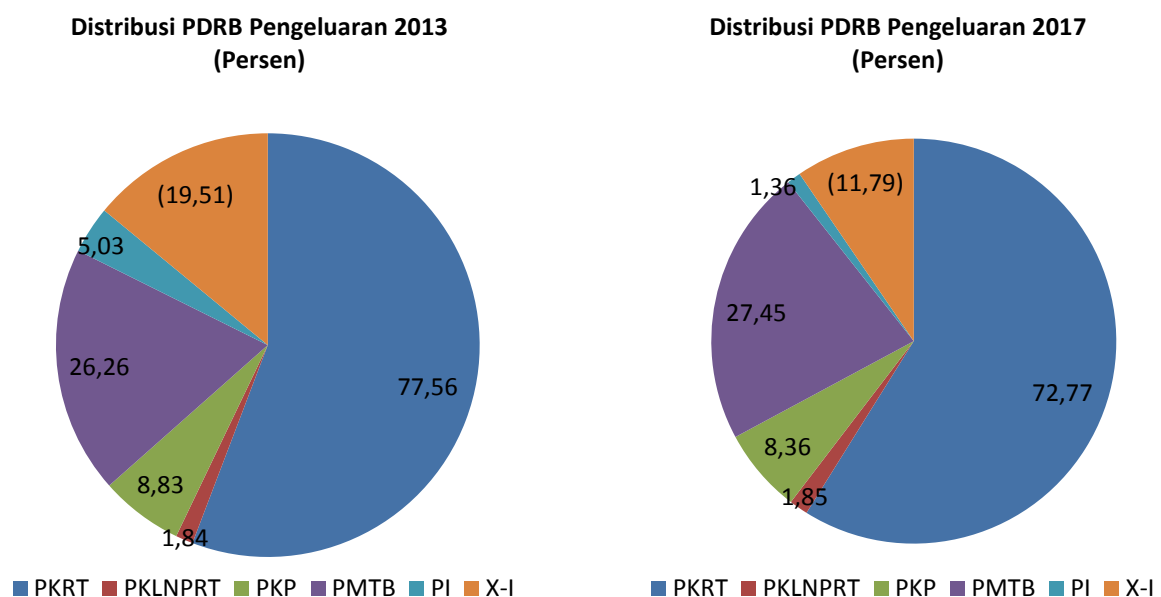
Sumber: BPS Kabupaten Magelang

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas terlihat bahwa selama periode 2013-2017, produk yang dikonsumsi di Kabupaten Magelang sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 72 persen), sedangkan konsumsi akhir pemerintah hanya memberi kontribusi sekitar 8 - 9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar.

Ekspor dan Impor juga mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 33 - 36 persen produk Kabupaten Magelang diperdagangkan ke luar daerah dan sekitar 44 - 56 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk impor dari luar daerah. Pada tahun 2013-2017 perdagangan Kabupaten Magelang yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor selalu lebih rendah dari nilai impor, yang berarti bahwa perdagangan Kabupaten Magelang selalu menunjukkan posisi “defisit”.



Sumber : BPS Kabupaten Magelang

Grafik 3.2. Perbandingan Distribusi PDRB Kabupaten Magelang menurut Pengeluaran, 2013 dan 2017 (Persen)

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang dari tahun 2013 - 2017 cenderung fluktuatif, dengan masing-masing pertumbuhan di atas lima persen, yaitu sebesar 5,91 persen (2013); 5,38 persen (2014); 5,18 persen (2015), 5,37 persen (2016), dan 5,06 persen (2017). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 5,91 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 5,06 persen.

Tabel 3.4. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Magelang Adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2013-2017 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,32	3,57	4,08	4,45	4,54
2. Pengeluaran Konsumsi LN PRT	7,73	6,34	-1,28	5,39	4,23
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,83	2,51	2,43	0,57	2,78
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,97	3,95	4,49	4,81	6,97
5. Ekspor	7,33	-0,29	7,81	5,71	4,21
6. Impor	-0,84	-2,40	0,14	3,07	4,22
PDRB	5,91	5,38	5,18	5,37	5,06

Sumber: BPS Kabupaten Magelang

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sementara itu, indeks implisit PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LN PRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan secara umum, terlihat dari perubahan indeks implisit total yang bernilai positif. Keterangan lebih lanjut mengenai Indeks Implisit tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Perubahan Indeks Implisit PDRB Kabupaten Magelang menurut Pengeluaran, 2013 - 2017 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7,72	4,94	3,63	2,42	2,38
2. Pengeluaran Konsumsi LN PRT	6,66	8,30	9,54	2,31	2,51
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,14	8,08	8,34	3,23	3,32
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,93	10,45	6,36	2,40	2,08
5. Ekspor	-4,54	6,39	0,32	7,53	-2,91
6. Impor	3,82	8,13	1,89	0,30	-0,05
PDRB	4,34	6,13	4,73	2,61	2,24

Sumber: BPS Kabupaten Magelang

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

B. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data pada Tabel 3.6 menunjukkan hal tersebut, yaitu sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Dalam kurun waktu 2010-2016 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik secara nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan), yang sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Secara teori, kenaikan jumlah penduduk tersebut akan mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 3.6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Magelang, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Triliun Rupiah)	15,20	16,53	17,82	19,07	20,41
b. ADHK 2010 (Triliun Rupiah)	12,72	13,17	13,71	14,32	14,97
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	77,56	75,38	73,81	73,03	72,77
Rata-rata konsumsi per-rumah tangga/tahun					
a. ADHB (Juta Rupiah)	45,19	48,35	51,35	53,18	56,04
b. ADHK 2010 (Juta Rupiah)	37,80	38,53	39,49	39,93	41,10
Rata-rata konsumsi perkapita/tahun					
a. ADHB (Juta Rupiah)	12,44	13,39	14,31	15,17	16,09
b. ADHK 2010 (Juta Rupiah)	10,41	10,68	11,01	11,39	11,80
Pertumbuhan (% ADHK)					
a. Total Konsumsi RT	4,32	3,57	4,08	4,45	4,54
b. Per-Rumah tangga	2,66	1,95	2,48	1,12	2,93
c. Perkapita	4,12	2,56	3,09	3,49	3,61

Sumber: BPS Kabupaten Magelang

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB Kabupaten Magelang pada periode tahun 2013 - 2017 masih tinggi (di atas 72 persen) tetapi mulai menurun perlahan. Pada tahun 2013 sebesar 77,56 persen dan menurun setiap tahun hingga pada tahun 2017 menjadi sebesar 72,77 persen.

Penurunan proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB tersebut berbeda dengan rata-rata konsumsi rumah tangga. Secara umum, rata-rata konsumsi baik per rumah tangga maupun per kapita terus meningkat dari tahun ke tahun baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Atas dasar harga berlaku, pada tahun 2013 konsumsi rumah tangga per kapita sebesar 12,44 juta rupiah, yang artinya setiap penduduk Kabupaten Magelang rata-rata mengeluarkan biaya sebesar 12,44 juta rupiah selama setahun untuk konsumsi, baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain). Pengeluaran tersebut terus meningkat setiap tahun dan rata-rata konsumsi per kapita tahun 2017 mencapai 16,09 juta rupiah.

Apabila dilihat menurut harga konstan, pertumbuhan konsumsi per kapita sempat melambat atau kurang dari tiga persen pada tahun 2014 sebesar 2,56 persen. Tetapi pada 2015 hingga 2017 pertumbuhan konsumsi per kapita meningkat di atas tiga persen setiap tahunnya.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik maupun yang berasal dari impor turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Dari Tabel 3.6 nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada pada kisaran 1 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

C. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran masih sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya, yaitu hanya sekitar 1 persen saja. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah masih dapat ditingkatkan lagi. Beberapa lembaga yang memberikan andil cukup besar untuk PKLNPRT adalah organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, dan lembaga keagamaan.

Tabel 3.7. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Magelang, 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Triliun Rupiah)	0,36	0,42	0,45	0,49	0,52
b. ADHK 2010 (Triliun Rupiah)	0,30	0,32	0,32	0,34	0,35
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,84	1,90	1,86	1,86	1,85
Pertumbuhan (% ADHK)	7,73	6,34	-1,28	5,39	4,23

Sumber: BPS Kabupaten Magelang

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dari tabel 3.7 dapat dilihat pertumbuhan konsumsi LNPRT dari tahun ke tahun sangat fluktuatif. Pertumbuhan tahun 2013 dan 2014 meningkat cukup tinggi, yang salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan pengeluaran ormas, parpol, LSM dan lembaga lainnya karena adanya pemilihan kepala daerah (bupati/walikota dan gubernur) pada tahun 2013 dan pemilihan umum (legislatif) serta pemilihan presiden pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015 konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan negatif (konstraksi) yaitu sebesar 0,04 persen. Konstraksi ini diakibatkan oleh penurunan belanja, terutama belanja dari organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, dan lembaga keagamaan pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 pasca pesta demokrasi. Pada tahun 2016 dan 2017 konsumsi LNPRT kembali mengalami pertumbuhan di atas empat persen.

D. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan konsumsi akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Magelang serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah sebesar 1,73 triliun rupiah, yang terus meningkat hingga pada 2017 nilainya mencapai 2,35 triliun rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami fluktuasi, dari 8,83 persen pada tahun 2013 dan di tahun 2017 sebesar 8,36 persen yang merupakan proporsi terendah dalam kurun waktu tersebut.

Tabel 3.8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Magelang, 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Triliun Rupiah)	1,73	1,92	2,13	2,21	2,35
b. ADHK 2010 (Triliun Rupiah)	1,39	1,43	1,46	1,47	1,51
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	8,83	8,74	8,81	8,46	8,36
Rata-rata konsumsi Pemerintah perkapita/tahun					
a. ADHB (Juta Rupiah)	1,42	1,55	1,71	1,76	1,85
b. ADHK 2010 (Juta Rupiah)	1,14	1,16	1,18	1,17	1,19
Pertumbuhan (% ADHK)					
a. Total Konsumsi Pemerintah	3,83	2,51	2,43	0,57	2,78
c. Konsumsi Pemerintah Perkapita	3,64	1,51	1,46	-0,36	1,87

Sumber: BPS Kabupaten Magelang

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2013 konsumsi pemerintah per kapita adh Berlaku sebesar 1,42 juta rupiah dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2017 konsumsi pemerintah per kapita mencapai 1,85 juta rupiah.

Pertumbuhan konsumsi akhir pemerintah secara riil menunjukkan menunjukkan fluktuasi, baik secara keseluruhan maupun per kapita. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Dalam kurun waktu 2013-2017, pertumbuhan konsumsi pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2013, sebesar 3,83 persen, dan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 0,57 persen. Kondisi yang hampir sama terjadi pada pertumbuhan konsumsi pemerintah per

kapita dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 3,64 persen dan terendah tahun 2016 yang tumbuh negatif.

E. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect-input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor. Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun *riil*.

Tabel 3.9 menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2013-2017 meningkat dari 2,97 persen (2013) menjadi 6,97 persen (2017). Adapun proporsi PMTB terhadap PDRB Pengeluaran pada tahun 2017 sebesar 27,45 persen.

Tabel 3.9. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Magelang, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Triliun Rupiah)	5,15	5,91	6,57	7,05	7,70
b. ADHK 2010 (Triliun Rupiah)	4,50	4,68	4,89	5,12	5,48
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	26,26	26,96	27,20	27,00	27,45
Pertumbuhan (% ADHK)	2,97	3,95	4,49	4,81	6,97

Sumber: BPS Kabupaten Magelang

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

F. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud di sini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antardaerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 3.10. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Magelang, 2013-2017

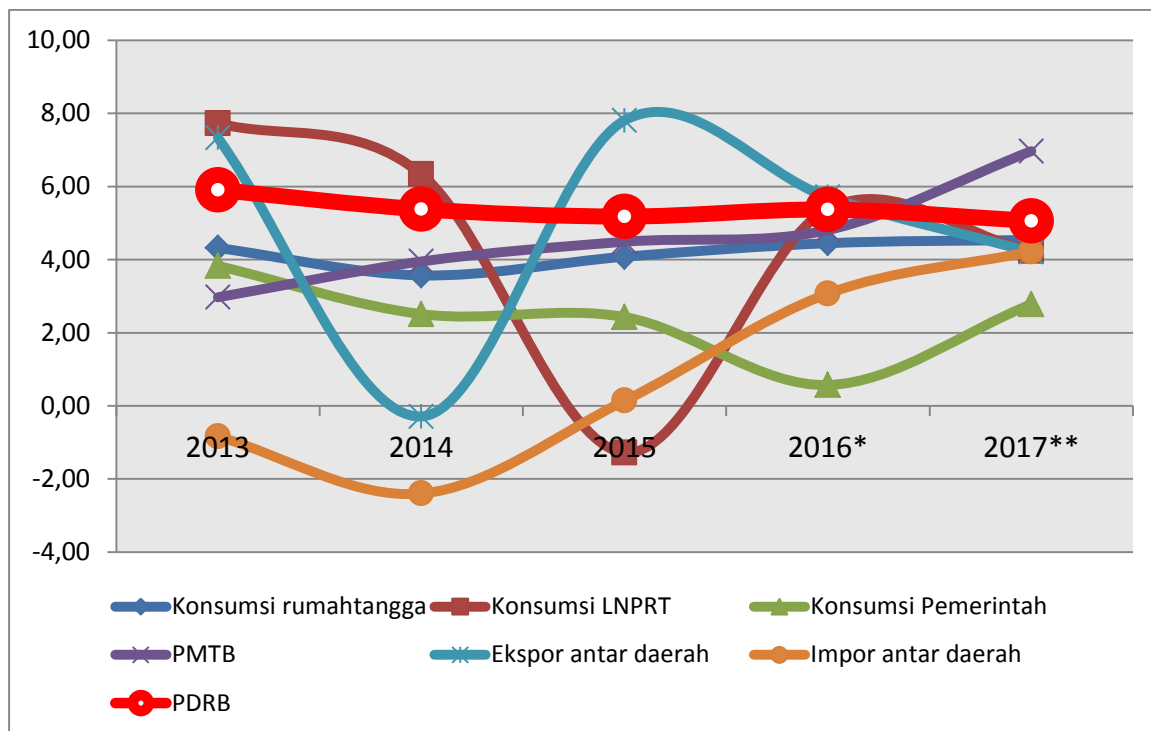
Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Perubahan Inventori					
a. ADHB (Triliun Rupiah)	0,99	1,15	0,80	0,21	0,38
b. ADHK 2010 (Triliun Rupiah)	0,54	0,56	0,16	0,14	0,15
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	5,03	5,26	3,31	0,79	1,36

Sumber: BPS Kabupaten Magelang

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsi, yang dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif). Demikian halnya yang terjadi dengan proporsi perubahan inventori terhadap PDRB di Kabupaten Magelang. Selama periode 2013-2017, proporsinya sangat fluktuatif. Pada tahun 2017, proporsi perubahan inventori terhadap PDRB sebesar 1,36 persen, terendah dalam kurun waktu 2013-2017 pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,79 persen, dan tertinggi sebesar 5,26 persen pada tahun 2014.



Sumber : BPS Kabupaten Magelang

Grafik 3.3. Pertumbuhan Beberapa Komponen Pengeluaran PDRB Kabupaten Magelang, 2013-2017 (Persen)

G. PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTARDAERAH

Net ekspor antardaerah didefinisikan sebagai ekspor antardaerah dikurangi impor antardaerah. Pada penghitungan ekspor-impor antardaerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar kabupaten menjadikan komponen ini (dalam series PDRB tahun dasar 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antardaerah dan impor antardaerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antardaerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antardaerah lebih besar dari pada impor antardaerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antardaerah menjadi nilai ekspor antardaerah dan nilai impor antardaerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross-hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitungan ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

Dari tabel 3.11 dapat dilihat gambaran ekspor dan impor antardaerah, yaitu ekspor Kabupaten Magelang ke Kabupaten/Kota lain serta impor dari Kabupaten/Kota lain ke Kabupaten Magelang. Terlihat bahwa nilai ekspor antardaerah selalu lebih besar dibanding nilai impornya, sehingga net ekspor antardaerah selalu negatif dari tahun ke tahun.

Tabel 3.11. Net Ekspor Adh Berlaku dan Adh Konstan 2010, 2013-2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Net Ekspor ADHB (Triliun rupiah)	(3,82)	(4,00)	(3,62)	(2,91)	(3,31)
Net Ekspor ADHK 2010 (Triliun rupiah)	(2,44)	(2,23)	(1,67)	(1,52)	(1,58)

Sumber: BPS Kabupaten Magelang

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB
KABUPATEN MAGELANG
MENURUT PENGELUARAN
TAHUN 2013-2017

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

A. PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

Tabel 4.1. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita
Kabupaten Magelang, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB					
a. ADHB (Triliun Rupiah)	19,60	21,92	24,15	26,11	28,05
b. ADHK 2010 (Triliun Rupiah)	17,02	17,94	18,86	19,88	20,88
PDRB Perkapita					
a. ADHB (Juta Rupiah)	16,05	17,77	19,39	20,77	22,11
b. ADHK 2010 (Juta Rupiah)	13,93	14,54	15,15	15,81	16,46
Pertumbuhan (% ADHK)					
a. PDRB	5,91	5,38	5,18	5,37	5,06
c. PDRB Perkapita	5,71	4,35	4,18	4,39	4,13
Jumlah penduduk (ribu)	1 221,67	1 233,70	1 245,50	1 257,12	1 268,40

Sumber: BPS Kabupaten Magelang

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

B. PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Dari tabel 4.2. dapat dilihat bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah Kabupaten Magelang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 4.2. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Kabupaten Magelang, 2013-2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (Triliun rupiah)	15,20	16,53	17,82	19,07	20,41
Total PMTB (Triliun rupiah)	5,15	5,91	6,57	7,05	7,70
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB	2,95	2,80	2,71	2,71	2,65

Sumber: BPS Kabupaten Magelang

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Rata-rata rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB selama lima tahun terakhir sebesar 2,76. Hal ini dapat diartikan penggunaan produk untuk konsumsi rumah tangga 2,76 kali lebih besar dibanding untuk PMTB. Nilai ini cenderung stabil selama lima tahun terakhir, namun setiap tahun terjadi penurunan rasio. Penurunan tersebut lebih disebabkan peningkatan nilai PMTB yang cukup besar di tahun tersebut.

C. PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPR, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 4.3. Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Kabupaten Magelang, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (Triliun Rupiah)					
a. Rumah Tangga	15,20	16,53	17,82	19,07	20,41
b. LNPRT	0,36	0,42	0,45	0,49	0,52
c. Pemerintah	1,73	1,92	2,13	2,21	2,35
Jumlah	17,30	18,86	20,40	21,76	23,27
PDRB (Triliun Rupiah)					
	19,60	21,92	24,15	26,11	28,05
Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB (%)					
	88,23	86,02	84,48	83,35	82,98

Sumber: BPS Kabupaten Magelang

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lebih dari 80 persen produk barang dan jasa yang berada di wilayah Kabupaten Magelang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Proporsi ini mengalami penurunan setiap tahunnya dari 88,23 persen pada tahun 2013 menjadi 82,98 persen pada tahun 2017. Sementara itu produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir, yaitu PMTB dan ekspor memiliki peran yang relatif kecil, yaitu kurang dari 20 persen.

D. NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “Ekspor Neto”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran uang masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran uang keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selama periode 2013-2017, posisi perdagangan barang dan jasa Kabupaten Magelang dengan luar daerah dan antar kabupaten/kota, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Magelang selalu dalam posisi defisit. Nilai ekspor yang lebih kecil dari impor menyebabkan adanya aliran uang keluar.

E. INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Keterangan:

I_t = PMTB tahun ke t;

Y_t = Output tahun ke t;

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit.

Tabel 4.4 *Incremental Capital Output Ratio* Kabupaten Magelang, 2013-2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHK 2010 (Triliun rupiah)	17,02	17,94	18,86	19,88	20,88
Perubahan PDRB ADHK 2010 (Triliun rupiah)	0,95	0,92	0,93	1,01	1,01
PMTB ADHK 2010 (Triliun rupiah)	4,50	4,68	4,89	5,12	5,48
ICOR	4,74	5,11	5,27	5,06	5,45

Sumber: BPS Kabupaten Magelang

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 4.4 menunjukkan besaran ICOR meningkat dari 4,74 pada tahun 2013 menjadi 5,45 pada tahun 2017. Semakin tinggi nilai ICOR menunjukkan semakin besar kapital yang digunakan untuk dapat meningkatkan 1 unit nilai output, yang artinya investasi belanja modal semakin tidak efektif.

BAB V

PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2013-2017 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Magelang pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan antardaerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Nominal PDRB Kabupaten Magelang tahun 2017 adh Berlaku mencapai 28,05 triliun rupiah. Dari nilai sebesar itu sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir , yaitu konsumsi rumah tangga, LNPRT dan pemerintah yang mencapai 82,98 persen dimana 72,77 persennya adalah konsumsi rumah tangga. Dengan peranan konsumsi rumah tangga yang sangat dominan, tidak dapat dipungkiri bahwa komponen ini adalah penopang dan penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang.
3. Peranan investasi dalam perekonomian selalu merupakan *issue* yang menarik untuk diulas, karena investasi dalam bentuk modal/fisik akan digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi yang keluarannya adalah output. Peranan investasi dalam PDRB Pengeluaran Kabupaten Magelang dapat didekati dari proporsi PMTB dalam PDRB. Pada tahun 2017 proporsi PMTB ini berada pada kisaran 27-28 persen, atau dapat dikatakan peranan investasi dalam perekonomian Kabupaten Magelang kurang dari 30 persen.
4. Nilai Net Ekspor Kabupaten Magelang setiap tahun bernilai negatif yang artinya nilai impor lebih besar dari nilai ekspornya. Dimana defisit ini menurun dari 3,82 triliun pada tahun 2013 menjadi 3,31 triliun rupiah di tahun 2017.
5. Dari seluruh data, indikator dan ulasan yang ditampilkan dalam publikasi ini dapat dimanfaatkan oleh para pengguna data untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan, evaluasi dan berbagai analisis ekonomi lainnya. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, juga dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia.

LAMPIRAN

**Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran
Kabupaten Magelang, 2013-2017**

Komponen Pengeluaran	Juta Rupiah					
	(1)	2013 (2)	2014 (3)	2015 (4)	2016* (5)	2017** (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga		15 203 515,40	16 525 058,44	17 824 181,25	19 068 541,09	20 408 392,82
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT		361 325,40	416 121,71	449 989,77	485 222,25	518 478,98
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah		1 730 237,29	1 916 931,81	2 127 326,48	2 208 562,37	2 345 302,33
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto		5 147 306,09	5 909 839,42	6 568 276,66	7 049 221,21	7 697 266,58
5. Perubahan Inventori		985 073,80	1 152 562,93	798 999,71	207 341,99	381 860,11
6. Ekspor		7 054 331,31	7 483 484,53	8 093 796,83	9 200 202,53	9 308 968,27
7. Impor		10 878 944,43	11 480 587,54	11 713 926,54	12 110 142,38	12 615 095,09
8. Net Ekspor		(3 824 613,12)	(3 997 103,01)	(3 620 129,71)	(2 909 939,85)	(3 306 126,82)
PDRB		19 602 844,86	21 923 411,31	24 148 644,16	26 108 949,06	28 045 174,00

Sumber: BPS Kabupaten Magelang

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2013-2017

Komponen Pengeluaran						Juta Rupiah	
	2013	2014	2015	2016*	2017**		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	12 716 030,28	13 170 150,69	13 707 302,81	14 317 884,58	14 967 593,10		
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	304 618,87	323 925,52	319 783,09	337 020,13	351 286,01		
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 394 413,77	1 429 358,45	1 464 115,58	1 472 425,17	1 513 352,66		
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4 501 615,61	4 679 503,78	4 889 692,78	5 124 683,83	5 481 954,77		
5. Perubahan Inventori	544 883,21	561 286,94	157 169,35	142 565,61	151 534,81		
6. Ekspor	7 297 927,71	7 276 740,42	7 844 696,82	8 292 527,18	8 641 789,31		
7. Impor	9 738 733,83	9 504 677,42	9 518 108,46	9 810 362,26	10 224 709,63		
8. Net Ekspor	(2 440 806,12)	(2 227 937,00)	(1 673 411,64)	(1 517 835,08)	(1 582 920,32)		
PDRB	17 020 755,61	17 936 288,38	18 864 651,97	19 876 744,24	20 882 801,03		

Sumber: BPS Kabupaten Magelang

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 3. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran
Kabupaten Magelang, 2013-2017**

Komponen Pengeluaran	Persen					
	2013 (2)	2014 (3)	2015 (4)	2016* (5)	2017** (6)	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	12,37	8,69	7,86	6,98	7,03	
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	14,90	15,17	8,14	7,83	6,85	
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,21	10,79	10,98	3,82	6,19	
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,96	14,81	11,14	7,32	9,19	
5. Perubahan Inventori***	-	-	-	-	-	
6. Ekspor	2,46	6,08	8,16	13,67	1,18	
7. Impor	2,94	5,53	2,03	3,38	4,17	
PDRB	10,51	11,84	10,15	8,12	7,42	

Sumber: BPS Kabupaten Magelang

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

*** Laju pertumbuhan tidak ditampilkan

**Lampiran 4. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Pengeluaran
Kabupaten Magelang, 2013-2017**

Komponen Pengeluaran	Persen					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga		4,32	3,57	4,08	4,45	4,54
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT		7,73	6,34	(1,28)	5,39	4,23
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah		3,83	2,51	2,43	0,57	2,78
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto		2,97	3,95	4,49	4,81	6,97
5. Perubahan Inventori***		-	-	-	-	-
6. Ekspor		7,33	(0,29)	7,81	5,71	4,21
7. Impor		(0,84)	(2,40)	0,14	3,07	4,22
PDRB		5,91	5,38	5,18	5,37	5,06

Sumber: BPS Kabupaten Magelang

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

*** laju pertumbuhan tidak ditampilkan

**Lampiran 5. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran
Kabupaten Magelang, 2013-2017**

Komponen Pengeluaran	Persen					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga		77,56	75,38	73,81	73,03	72,77
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT		1,84	1,90	1,86	1,86	1,85
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah		8,83	8,74	8,81	8,46	8,36
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto		26,26	26,96	27,20	27,00	27,45
5. Perubahan Inventori		5,03	5,26	3,31	0,79	1,36
6. Ekspor		35,99	34,13	33,52	35,24	33,19
7. Impor		55,50	52,37	48,51	46,38	44,98
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Magelang

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 6. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Pengeluaran
Kabupaten Magelang, 2013-2017**

Komponen Pengeluaran	Persen					
	(1)	2013 (2)	2014 (3)	2015 (4)	2016* (5)	2017** (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga		74,71	73,43	72,66	72,03	71,67
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT		1,79	1,81	1,70	1,70	1,68
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah		8,19	7,97	7,76	7,41	7,25
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto		26,45	26,09	25,92	25,78	26,25
5. Perubahan Inventori		3,20	3,13	0,83	0,72	0,73
6. Ekspor		42,88	40,57	41,58	41,72	41,38
7. Impor		57,22	52,99	50,45	49,36	48,96
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Magelang

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Lampiran 7. Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2013-2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	119,56	125,47	130,03	133,18	136,35
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	118,62	128,46	140,72	143,97	147,59
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	124,08	134,11	145,30	149,99	154,97
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	114,34	126,29	134,33	137,55	140,41
5. Perubahan Inventori	180,79	205,34	508,37	145,44	251,99
6. Ekspor	96,66	102,84	103,18	110,95	107,72
7. Impor	111,71	120,79	123,07	123,44	123,38
PDRB	115,17	122,23	128,01	131,35	134,30

Sumber: BPS Kabupaten Magelang

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 8. Perubahan Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2013-2017

Komponen Pengeluaran	Persen					
	(1)	2013 (2)	2014 (3)	2015 (4)	2016* (5)	2017** (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga		7,72	4,94	3,63	2,42	2,38
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR		6,66	8,30	9,54	2,31	2,51
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah		6,14	8,08	8,34	3,23	3,32
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto		1,93	10,45	6,36	2,40	2,08
5. Perubahan Inventori***		-	-	-	-	-
6. Ekspor		(4,54)	6,39	0,32	7,53	(2,91)
7. Impor		3,82	8,13	1,89	0,30	(0,05)
PDRB		4,34	6,13	4,73	2,61	2,24

Sumber: BPS Kabupaten Magelang

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

*** Iaju pertumbuhan tidak ditampilkan

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAGELANG

Jl. Soekarno-Hatta No. 4 Kota Mungkid 56511,

Telp (62-293) 788143, Faks (62-293) 788143,

E-Mail : bps3308@bps.go.id Homepage: <http://magelangkab.bps.go.id>

